



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN

JALAN SIMPANG TOBOH V KOTO KAMPUNG DALAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN KODE POS 25552
TELEPON (0751) 690123 FAXSIMILE (0751) 690123
LAMAM <https://kkp.go.id> SUREL supm.pariaman@kkp.go.id

Yth. Kepala Pusat Pendidikan KP di Jakarta

SURAT PENGANTAR

NOMOR : B. /SUPM.PRM/TU.210/IV/2026

No	Naskah yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Triwulan I SUPM Pariaman Tahun 2026	1 berkas	Untuk disampaikan kepada Kepala Pusat Pendidikan KP

Diterima tanggal :

Nama Jelas :

Tandatangan :

20 April 2026
Kepala SUPM Pariaman



Adnal Yeka





LAPORAN KINERJA (LKj) TRIWULAN I SUPM PARIAMAN TAHUN 2026

Disusun oleh: SUPM Pariaman



Sekolah Usaha Perikanan Menengah
(SUPM) Pariaman

(0751) 690123
Jalan Simpang Toboh V Koto Kampung Dalam
Kota Pariaman. Kotak Pos No. 112 Pariaman

 <https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-pariaman/>

 [bppsdm_supmpariaman](#)

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SUPM Pariaman mengemban amanat dari dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga merupakan alat kendali serta alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Semoga LKj SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program sekaligus sebagai masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada yang berkepentingan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Pariaman, 20 April 2026
Kepala Sekolah



Dr. Adnal Yeka, A.Pi., M.Si
NIP. 19730717 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.4. Keragaan SDM SUPM Pariaman.....	5
1.5. Sistematika Laporan Kinerja	9
1.6. Potensi dan Permasalahan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis.....	13
2.1.1. Visi dan Misi SUPM Pariaman.....	16
2.1.2. Tujuan.....	16
2.1.3. Strategi Pelaksanaan Program Pengembangan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan	17
2.2. Rencana Kerja Tahun 2026	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	18
2.4. Pengukuran Kinerja	19
2.4.1. Rumus Pengukuran.....	19
2.4.2. Metode Pengukuran Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) SUPM Negeri Pariaman Triwulan I Tahun 2026	21
3.2. Analisis Capaian Kinerja	23
3.2.1. Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	23
3.2.2. Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan AKuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	26
3.2.3. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya SUPM Pariaman	31
BAB IV PENUTUP	34
4.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	34
4.2. Permasalahan	35
4.3. Rekomendasi.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Capaian Kinerja SUPM Pariaman Tahun 2026	vi
Gambar I. 1	Struktur Organisasi SUPM Pariaman Tahun 2026	4
Gambar II. 1	Ketentuan penetapan indeks capaian IKU.....	19
Gambar III. 1	Capaian Kinerja SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026 pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku	21
Gambar IV. 1	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	34

DAFTAR TABEL

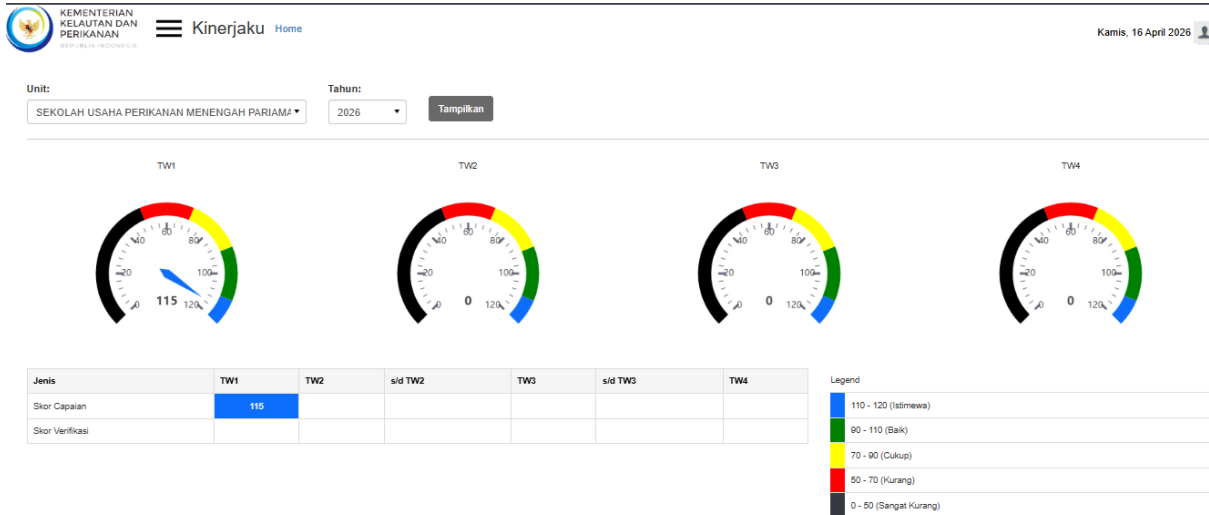
Tabel 1. 1	Capaian Kinerja SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Rincian Indikator Kinerja Utama	vii
Tabel I. 1	Rincian PNS SUPM Pariaman Berdasarkan Jenis Jabatan, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan Per 31 Maret 2026	7
Tabel I. 2	Rincian PPNPN dan PJLP SUPM Negeri Pariaman Berdasarkan Jenis Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan Per 31 Desember 2025	8
Tabel II. 1	Target per- IKU Selama Periode Renstra Tahun 2025-2029	14
Tabel II. 2	Anggaran SUPM Negeri Pariaman Awal/Per Tahun 2026	17
Tabel II. 3	Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja SUPM Pariaman Tahun 2026.....	18
Tabel III. 1	Capaian Kinerja SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Rincian Indikator Kinerja Utama	21
Tabel III. 2	Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	23
Tabel III. 3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 SUPM Pariaman dengan SUPM Lain	24
Tabel III. 4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%).....	26
Tabel III. 5	Perbandingan Realisasi IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)	27
Tabel III. 6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%).....	30
Tabel III. 7	Rekapan Satker Yang Mempunyai IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%).....	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri KP No.5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau disingkat BPPSDM KP, memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM di bidang kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program penyuluhan dan pengembangan SDM KP dilakukan antara lain melalui kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024. Mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan.

Fokus SUPM Pariaman di Tahun 2026, selain meningkatkan kemampuan kognitif para anak pelaku utama yang mengenyam pendidikan di satuan pendidikan KP yang tersebar, juga turut meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik.

SUPM Pariaman telah menetapkan 2 Sasaran Kegiatan pada Triwulan I tahun 2026. Sasaran Kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 Indikator Kinerja Kegiatan (IK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh skor kinerja SUPM Pariaman pada Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 115% sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Capaian Kinerja SUPM Pariaman Tahun 2026
(sumber web : kinerjaku.kkp.go.id)

Pada Triwulan I Tahun 2026, dari 11 IK yang menjadi target kinerja SUPM Pariaman, telah tercapai 1 IK yang ditandai dengan warna hijau (telah mencapai target yang telah ditetapkan), 2 IK warna biru (telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan). Rincian target dan realiasi dari IK tersebut adalah sebagai berikut (Tabel 1.1).

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Rincian Indikator Kinerja Utama

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2026	% CAPAIAN
Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	104,00	7	10	120
	2	Jumlah kerjasama SUPM Pariaman di tahun berjalan (kesepakatan)	1,00			
	3	Jumlah pendidik SUPM Pariaman yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	1,00			
	4	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pariaman (%)	80,00			
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	5	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)	86,00	86,00	86,00	86,00
	6	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pariaman (Nilai)	82,00			
	7	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman (Indeks)	85,00			
	8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Pariaman (Nilai)	71			
	9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)	77	77	100	100
	10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	92,10			
	11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	71,75			

Keberhasilan capaian realisasi IKU pada Triwulan I Tahun 2026 disebabkan karena :

- Adanya komitmen pimpinan yang kuat terhadap capaian kinerja, adanya monitoring dan evaluasi.
- Tercapainya realisasi anggaran sesuai dengan target serapan anggaran tiap triwulan.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja SUPM Pariaman pada Triwulan I Tahun 2026 akan ditempuh langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pimpinan terhadap Timja yang menangani masing-masing IKU.
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dengan cara membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan supaya memudahkan dalam pembuatan berkas pertanggungjawaban keuangan untuk pendukung laporan keuangan.



.....

BAB I

.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) SUPM Negeri Pariaman merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang dicapai SUPM Pariaman serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SUPM Pariaman guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

Dasar pelaksanaan kegiatan SUPM Negeri Pariaman Triwulan I Tahun 2026 mengacu kepada:

- a. Renstra SUPM Pariaman Tahun 2025 – 2029, Reviu Renstra SUPM Pariaman No. B.137/SUPM-PRM/RC.221/II/2022 Tahun 2022 – 2025.
- b. DIPA SUPM Pariaman Tahun 2026 Nomor : SP DIPA- 032.12.2. 427573/2024 Tanggal 2 Desember 2025.
- c. Perjanjian Kinerja SUPM Pariaman Tahun 2026.
- d. Rencana Kerja Tahunan SUPM Pariaman Tahun 2026

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja SUPM Negeri Pariaman Triwulan I Tahun 2026 memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

- a. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SUPM Negeri Pariaman menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat;
- b. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan SUPM Pariaman;
- c. Sebagai umpan balik (*Feedback*) untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Menjelaskan tugas SUPM adalah melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai fungsi SUPM sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah;

2. Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
3. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
5. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
7. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat.
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi SUPM Pariaman terdiri dari Kepala Sekolah, Kasubbag Umum dan Guru. Penyelenggaraan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagai tugas pokok fungsional atau guru, kepala sekolah dibantu oleh beberapa orang wakil kepala sekolah yang menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkajian dan penyiapan perumusan bahan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, dan bimbingan tata penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan penyusunan kebutuhan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik, peserta didik, dan alumni pendidikan berstandar internasional di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil pendidikan di bidang kelautan dan perikanan;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah dan bidang-bidang lainnya, yaitu :

- a. Wakil Kepala Sekolah Urusan Pengajaran;
- b. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan;
- c. Wakil Kepala Urusan Sekolah Sarana Pendidikan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kepala Unit Sertifikasi dan TUK.

Pengelolaan SUPM Negeri Pariaman didukung dengan pengelolaan administrasi dibawah wewenang Kepala Sub Bagian Umum dengan fungsi sebagai berikut :

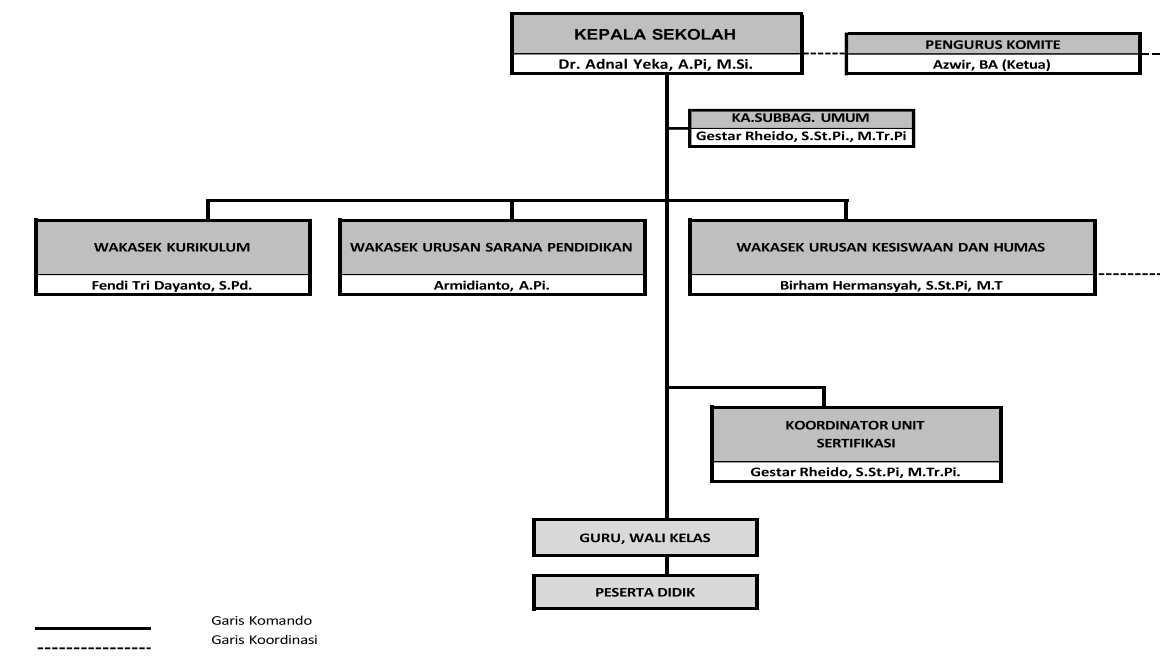
1. Pelaksanaan penyerasian dan penyusunan rencana, program, anggaran, kegiatan, dan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan;

2. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, dan barang kekayaan milik negara, serta pelaksanaan urusan Umum dan rumah tangga SUPM Pariaman; dan
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan SUPM Pariaman.

Kepala Sub. Bagian Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya didukung oleh :

- a. Analis Rencana Program dan Kegiatan serta Pelaporan;
- b. Analis Keuangan dan Bendahara Pengeluaran;
- c. Analis SDM Aparatur;
- d. Pengelola RTP dan pelaporan;
- e. Pengelola Data dan Persuratan;
- f. Pengelola Database peserta didik/ SIMDIK dan Monitoring Alumni;
- g. Pengelola Layanan Kehumasan dan Publikasi.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) SUPM PARIAMAN TAHUN 2026



Gambar I. 1 Struktur Organisasi SUPM Pariaman Tahun 2026

Beberapa potensi yang dimiliki SUPM Negeri Pariaman dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di wilayah kerjanya (Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi) yaitu :

1. SUPM Negeri Pariaman merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan sistem pendidikan vokasi dengan model pembelajaran 30% teori dan 70% praktek;
2. Kemudahan akses transportasi ke lokasi SUPM Negeri Pariaman yang berada di daerah perlintasan jalan utama di Sumatera Barat bagi peserta didik, sehingga lokasi SUPM Negeri Pariaman menjadi salah satu aspek strategis dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.
3. Tingginya kebutuhan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan merupakan peluang yang harus disambut dengan penyediaan SDM kompeten melalui penyelenggaraan pendidikan menengah KP.
4. Telah terakreditasinya oleh Badan Akreditasi untuk 4 (empat) Program Keahlian SUPM Pariaman yaitu Program Keahlian Nautika Perikanan Laut, Teknik Perikanan Laut, Teknologi Budidaya Perikanan dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dengan nilai sangat baik "A".
5. Tempat Uji Kompetensi (TUK) SUPM Negeri Pariaman merupakan potensi rujukan bagi SMK Perikanan di wilayah Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi.

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di wilayah kerjanya (Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi), SUPM Negeri Pariaman menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

1. Aspek pendukung Sarana prasarana pendidikan yang dimiliki memerlukan penyesuaian (*upgrade*) teknologi untuk memenuhi tuntutan kurikulum dan kebutuhan sesuai lapangan kerja.
2. Aspek permasalahan sebaran dan serapan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) bidang kelautan dan perikanan yaitu kurangnya dukungan mitra kerja bidang usaha kelautan dan perikanan.
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM di SUPM Negeri Pariaman.
4. Terbatasnya standar kompetensi.
5. Kemampuan dan daya jangkau area layanan masih terbatas.

1.4. Keragaan SDM SUPM Pariaman

SUPM Negeri Pariaman didukung sebanyak 57 Orang ASN (35 Orang PNS dan 22 Orang PPPK) dengan status pegawai struktural dan fungsional. PNS SUPM Pariaman memiliki kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 11 orang, S1/D4 sebanyak 14 orang, S2 sebanyak 9 orang, dan S3 sebanyak 1 Orang (Tabel I.1). SUPM Pariaman juga memiliki PPPK Paruh Waktu sebanyak 6 orang dan PJLP sebanyak 11 orang dengan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.2

No	Jenis Jabatan	JK PNS		JK PPPK		JK PPPK Paruh Waktu		Golongan				PPPK	PPPK Paruh Waktu	Kualifikasi Pendidikan PNS				Kualifikasi Pendidikan PPPK			Kualifikasi Pendidikan PPPK Paruh Waktu		
		L	P	L	P	L	P	I	II	III	IV			SLTA	S1/D4	S2	S3	SD	SLTA	D3	S1/D4	SD	SLTA
IV	Fungsional Umum																						
1	Pelaksana Adm dan Teknis	15	7	10	11	6	49		1	19	2	21	6					4	3	2	13	2	4
	Jumlah (IV)	15	7	10	11	6	49		1	19	2	21	6					4	3	2	13	2	4
	Total (I+II+III+IV)	26	9	10	12	6	49		1	30	4	22	6	1	4	7	1	4	3	2	14	2	4

Tabel I. 2 Rincian PPNPN dan PJLP SUPM Negeri Pariaman Berdasarkan Jenis Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan Per 31 Desember 2025

No.	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Kualifikasi Pendidikan				
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1/D4
1	Pramubakti (Tenaga Kebersihan)	1	1				1	1
2	Pramubakti (Petugas Tefa Pengolahan)		2				1	1
3	Pramubakti (Petugas Keamanan)	1				1		
4	Pramubakti (Petugas Tambak)	2					1	1
5	Pramubakti (Pemeliharaan dan Perawatan Kapal)	1				1		
6	Pramubakti (Mekanik dan Teknisi Listrik)	1						1
7	Pramubakti (Tenaga Kependidikan Pengelola Sarpras Proka NKPI)	1						1
8	Pramubakti (Desain Komunikasi Visual)	1						1
	Jumlah	8	3			2	3	6

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja SUPM Negeri Pariaman Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Permenpan-RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permen KP No. 68 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja SUPM Negeri Pariaman Triwulan IV Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja SUPM Pariaman pada Triwulan IV Tahun 2025. Sistematika penyajian Laporan Kinerja SUPM Negeri Pariaman Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan atau gambaran umum laporan, antara lain berisi uraian singkat capaian, sasaran, dan kendala pada Triwulan IV Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang SUPM Negeri Pariaman seperti visi, misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di SUPM Pariaman Triwulan IV Tahun 2025.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini menggambarkan uraian singkat tentang Rencana Strategis SUPM Negeri Pariaman, Rencana Kerja Tahunan SUPM Pariaman Triwulan IV Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja SUPM Pariaman Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan SUPM Pariaman pada Triwulan IV Tahun 2025.

5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan permasalahan yang dihadapi SUPM Pariaman dalam mencapai target IKU Triwulan IV Tahun 2025 beserta rekomendasi sebagai perbaikan untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.6. Potensi dan Permasalahan

Potensi

Beberapa potensi yang dimiliki SUPM Negeri Pariaman dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di wilayah kerjanya (Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi) yaitu :

1. SUPM Negeri Pariaman merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan sistem pendidikan vokasi dengan model pembelajaran 30% teori dan 70% praktek;
2. Kemudahan akses transportasi ke lokasi SUPM Negeri Pariaman yang berada di daerah perlintasan jalan utama di Sumatera Barat bagi peserta didik, sehingga lokasi SUPM Negeri Pariaman menjadi salah satu aspek strategis dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.
3. Tingginya kebutuhan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan merupakan peluang yang harus disambut dengan penyediaan SDM kompeten melalui penyelenggaraan pendidikan menengah KP.
4. Telah terakreditasinya oleh Badan Akreditasi untuk 4 (empat) Program Keahlian SUPM Pariaman yaitu Program Keahlian Nautika Perikanan Laut, Teknik Perikanan Laut, Teknologi Budidaya Perikanan dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dengan nilai sangat baik "A".
5. Tempat Uji Kompetensi (TUK) SUPM Negeri Pariaman merupakan potensi rujukan bagi SMK Perikanan di wilayah Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi.

Permasalahan

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di wilayah kerjanya (Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi), SUPM Negeri Pariaman menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

1. Aspek pendukung Sarana prasarana pendidikan yang dimiliki memerlukan penyesuaian (*upgrade*) teknologi untuk memenuhi tuntutan kurikulum dan kebutuhan sesuai lapangan kerja.
2. Aspek permasalahan sebaran dan serapan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) bidang kelautan dan perikanan yaitu kurangnya dukungan mitra kerja bidang usaha kelautan dan perikanan.

3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM di SUPM Negeri Pariaman.
4. Terbatasnya standar kompetensi, artinya masih lemahnya kesadaran tenaga pendidik dan kependidikan dalam peningkatan/pengembangan mutu diri.
5. Kemampuan dan daya jangkau area layanan masih terbatas.



.....

BAB II

.....



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian yang mengelola bidang kelautan dan perikanan pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan pada hakekatnya terkait dengan persoalan-persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini relevan dengan *Visi* dan *Misi* Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2025-2029 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Peran strategis keberadaan BPPSDMKP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pengembangan SDM, dan menurunkan tujuan dari Renstra Review BPPSDM yg terakhir. Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi KKP, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya ;
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
6. Mengembangkan kapasitas SDM, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Meningkatkan inovasi iptek kelautan dan perikanan; dan
8. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Guna mewujudkan peran KKP dalam pembangunan nasional sebagaimana diuraikan diatas, maka diperlukan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan (SDM-KP) yang kompeten, mempunyai karakter kuat serta kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam kaitan ini, SUPM Pariaman mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan bidang kelautan dan perikanan. Agar program pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang diinginkan, maka diperlukan sebuah strategi dan perencanaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis SUPM Pariaman.

Tabel II. 1 Target per- IKU Selama Periode Renstra Tahun 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET RENSTRA 2025 - 2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	103	-	50	98	98
	2	Jumlah lulusan SUPM Pariaman (Orang)	121	-	59	120	150
	3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang kompeten (Orang)	181	330	398	398	398
	4	Nilai PNBP satker SUPM Pariaman (Rp. Miliar)	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315
	5	Kerjasama SUPM Pariaman yang disepakati (Kesepakatan)	1	1	1	1	1
	6	Persentase lulusan SUPM Pariaman yang besertifikasi kompetensi (%)	100		100	100	100
	7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Pariaman (%)	100	100	100	100	100
Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Pariaman (Lembaga)	1	1	1	1	1
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	9	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang tersertifikasi	20	20	20	20	20

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA 2025 - 2029				
		2025	2026	2027	2028	2029
kelautan dan perikanan yang terstandar	(Orang)					
	10 Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada SUPM Pariaman (Paket)	1	2	2	2	2
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	11 Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada SUPM Pariaman (Paket)	1	1	1	1	1
	12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)	85	85	85	85	85
	13 Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pariaman (Nilai)	81	82	83	84	85
	14 Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman (Indeks)	84	85	86	87	88
	15 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)	80	80	80	80	80
	16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pariaman (%)	80	80	80	80	80
	17 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	92	92	92	92	92

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET RENSTRA 2025 - 2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
	18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
	19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pariaman (%)	100	100	100	100	0 10

2.1.1. Visi dan Misi SUPM Pariaman

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi KKP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) **Nomor 15 Tahun 2024** adalah peraturan yang mengubah **Rencana Strategis** Kementerian Kelautan dan Perikanan **Tahun 2025-2029**, SUPM Pariaman memiliki tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Visi SUPM Pariaman sebagai berikut :

“Terwujudnya SUPM Pariaman sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan Perikanan berstandar Internasional yang menghasilkan sumber daya manusia (SDM) perikanan yang professional, bermoral dan berjiwa bahari”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi SUPM Pariaman adalah sebagai berikut :

“Menyiapkan Sumberdaya Manusia (SDM) Perikanan yang bermoral, profesional, berkompetisi dan berwawasan kelautan dan perikanan ”

2.1.2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi SUPM Pariaman dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 - 2029. Dengan demikian tujuan SUPM Negeri Pariaman adalah

“Mewujudkan SUPM Pariaman sebagai lembaga pendidikan Menengah Kejuruan Perikanan berstandar Internasional yang menghasilkan sumber daya perikanan yang professional, bermoral dan berjiwa bahari pada bidang Nautika Perikanan Laut, Teknik Perikanan Laut, Teknologi Budidaya Perikanan dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan untuk mengelola sumberdaya perairan yang berdaulat dan berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat”. Indikator tujuan tersebut meliputi :

1. SUPM Pariaman sebagai satuan pendidikan vokasi KP yang terstandar;
2. Terselenggaranya sistem pendidikan berbasis kompetensi pada SUPM Pariaman dengan pendekatan *teaching factory*;

3. Tersedianya stimulan dan fasilitas pengembangan SDM bidang kelautan dan perikanan pada SUPM Pariaman; dan
4. Terserapnya lulusan SUPM Pariaman di dunia usaha dan dunia industri.

2.1.3. Strategi Pelaksanaan Program Pengembangan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan program pengembangan Penyuluhan dan Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan khusus pada bidang pendidikan menengah di SUPM Pariaman mengikuti arah kebijakan strategi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan khususnya pada bidang pendidikan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan, kapasitas, serta kualitas satuan pendidikan lingkup KKP;
- 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pendekatan *Teaching Factory* di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) Mengembangkan kurikulum, tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana di Pendidikan Menengah dan Tinggi KP yang berstandar internasional;
- 4) Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
- 5) Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik kelautan dan perikanan;
- 6) Menguatkan jejaring termasuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan pendidikan;
- 7) Mengembangkan inovasi IPTEK di bidang kelautan dan perikanan.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana Kerja (RK) merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan, untuk nantinya menjadi dasar penyusunan target pada indikator kinerja utama di PK SUPM Pariaman yang merupakan cascading dari PK Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026. Berikut rincian Anggaran SUPM Negeri Pariaman Revisi PK Desember Tahun 2026:

Tabel II. 2 Anggaran SUPM Negeri Pariaman Awal/Per Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)
1.	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3.856.784.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.960.712.000

No	Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)
Total Anggaran SUPM Pariaman Tahun 2025		12.817.496.000

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran awal SUPM Pariaman tahun 2026 sebesar Rp. 12.817.496.000,- dengan anggaran untuk masing-masing kegiatan sebesar Rp. 3.856.784.000,- (Pendidikan Kelautan dan Perikanan) dan Rp. 8.960.712.000,- (Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan).

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Perjanjian Kinerja awal pada Tanggal 6 Januari 2026 dengan 2 sasaran kegiatan dan 11 indikator kinerja kegiatan serta pagu anggaran sebesar Rp. 12.817.496.000,- dengan rincian untuk Pendidikan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 3.856.784.000,- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 8.007.738.000,-;

Perjanjian kinerja ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II. 3 Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja SUPM Pariaman Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	104
		2	Jumlah kerjasama SUPM Pariaman di tahun berjalan (kesepakatan)	1
		3	Jumlah pendidik SUPM Pariaman yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	1
		4	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pariaman (%)	80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel	5	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)	86
		6	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pariaman (Nilai)	82

dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	7	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman (Indeks)	85
	8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Pariaman (Nilai)	71
	9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)	77
	10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	92,10
	11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	71,75

2.4. Pengukuran Kinerja

2.4.1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja SUPM Negeri Pariaman Triwulan I Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian pada masing- masing indicator kinerja.

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :



Gambar II. 1 Ketentuan penetapan indeks capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing- masing indicator yang ada dalam dokumen secara logical framework.

2.4.2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup SUPM Pariaman dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Setiap akhir triwulan, penanggungjawab untuk aplikasi kinerja melakukan penyusunan laporan interim berdasarkan data capaian kinerja yang telah dimasukkan ke dalam



.....

BAB III

.....



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) SUPM Negeri Pariaman Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja SUPM Negeri Pariaman Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SUPM Negeri Pariaman Triwulan I Tahun 2026 sebesar 115%.



Gambar III. 1 Capaian Kinerja SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026 pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku

Rincian capaian Kinerja SUPM Pariaman pada Triwulan I Tahun 2026 dari 3 IKU yang diukur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 1 Capaian Kinerja SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Rincian Indikator Kinerja Utama

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2026	% CAPAIAN
------------------	----------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------------	-----------

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	104	7	10	120
	2	Jumlah kerjasama SUPM Pariaman di tahun berjalan (kesepakatan)	1			
	3	Jumlah pendidik SUPM Pariaman yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	1			
	4	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pariaman (%)	80			
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	5	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)	86	86,00	86,00	86,00
	6	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pariaman (Nilai)	82			
	7	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman (Indeks)	85			
	8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Pariaman (Nilai)	71			
	9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)	77	77	100	100
	10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	92,10			
	11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	71,75			

Berdasarkan capaian kinerja dari 11 IKU SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026, terdapat 3 IKU menjadi capaian kinerja 115% pada Triwulan I Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. IKU Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang). IKU ini memiliki target triwulan I sebesar 7 Orang dengan capaian Triwulan I Tahun 2026 yang dicapai sebesar 10 Orang, maka persentase capaian bernilai 120%. Hal ini menunjukkan tercapainya IKU ini dengan adanya partisipasi alumni dalam melengkapi pendataan data dukung oleh satker dan banyaknya minat alumni yang ingin melanjutkan perkuliahan baik di kampus internal KKP maupun eksternal KKP.

2. IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%). Pada IKU ini memiliki target tahunan sebesar 86 dengan target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 86. Berdasarkan target tersebut capaian Triwulan I Tahun 2026 yang dicapai sebesar 86% maka persentase capaian bernilai 100%. Hal ini berarti capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan.
3. IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%). Pada IKU ini memiliki target tahunan sebesar 77 dengan target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100. Berdasarkan target tersebut capaian Triwulan I Tahun 2026 yang dicapai sebesar 100 maka persentase capaian bernilai 120%. Hal ini berarti capaian telah mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

- IKU 1. Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)

Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang Kelautan dan perikanan. Target yang telah ditetapkan untuk SUPM Pariaman adalah sebesar 7 Orang pada Triwulan I tahun 2026. Periode pengukuran IKU ini adalah triwulan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 sudah dilakukan pengukuran capaian sebesar 10 Orang.

Rincian perbandingan realisasi Triwulan I Tahun 2026 dengan target tahun lalu dan target renstra pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 2 Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)

SK. 1. Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten										
IKU. 1. Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Kerja (orang)										
Realisasi Tahun Sebelumnya				2026					Renstra	
									2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Realisasi	% Capaian	% kenaikan TAHUN 2025 – 2026	Target 2026	% Capaian Terhadap Target 2026
				104	7	10	120	120	-	120

Periode pengukuran IKU ini adalah Tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 sudah dilakukan pengukuran capaian dengan jumlah 7 Orang dari 10 Orang target Lulusan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja. Realisasi capaian IKU ini di Triwulan I Tahun 2026 mengalami peningkatan 120% jika dibandingkan dengan realisasi capaian Triwulan I tahun 2025 karena tidak ada pengukuran capaian pada triwulan I tahun 2025. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi menengah target Renstra 2026 sudah memperoleh persentase capaian 120%.

Realisasi IKU ini dibandingkan dengan realisasi Unit kerja sejenis yaitu SUPM dilingkungan BPPSDM KP sebagai berikut:

Tabel III. 3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 SUPM Pariaman dengan SUPM Lain

No	Satuan Kerja	Target TW I Tahun 2026		
		Target	Realisasi	%
1	SUPM Ladong	4	5	120%
2	SUPM Pariaman	7	10	120%
3	SUPM Kotaagung	4	5	120%
4	SUPM Tegal	8	8	100%
5	SUPM Waiheru	6	8	120%

Dari data Tabel III.3 dapat dilihat bahwa hampir SUPM lingkup Pusat Pendidikan KP dapat mencapai seluruh targetnya di Triwulan 1 Tahun 2026 termasuk SUPM Pariaman. SUPM Pariaman dapat mencapai 10 Orang dengan persentase capaian sebesar 120%. Sedangkan perbandingan capaian IK 1 dengan SUPM lain dapat dilihat pada Tabel III.3 diatas.

Tindakan pendukung Indikator Kinerja lulusan terserap DU/DI antara lain:

1. Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk menyalurkan Lulusan sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Fasilitas untuk lulusan untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial alumni SUPM Pariaman.

Kendala dalam upaya pencapaian IKU lulusan terserap DU/DI adalah kurangnya partisipasi alumni dalam melengkapi permintaan pendataan serapan dan banyaknya alumni yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

➤ **IKU 2. Jumlah kerjasama SUPM Pariaman di tahun berjalan (kesepakatan)**

IKU ini adalah indikator yang menunjukkan jumlah kemitraan dan/atau kerjasama yang dijalin dan/atau masih dilaksanakan antara SUPM Pariaman dengan pihak mitra, dimana definisi kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama

dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh Pusdik KP dan BPPSDM KP.

Kerja sama penyelenggaraan Pendidikan KP adalah penyelenggaraan kerja sama antara satker SUPM Pariaman dengan pihak mitra dengan durasi pelaksanaan tertentu dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan;
- b. Penerimaan lulusan SUPM Pariaman di Dunia Industri;
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan keilmuan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Pemanfaatan BMN SUPM Pariaman;
- e. Peningkatan pelayanan publik atas Pendidikan KP;
- f. Penerimaan lulusan SUPM Pariaman di Dunia Industri.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, untuk Triwulan I Tahun 2026 belum ada pengukuran capaian. Capaian pada IKU ini menghitung dokumen kerjasama yang baru disepakati oleh kedua belah pihak di Tahun 2026 dan sudah mencapai progress Triwulan I sebanyak 1 kerjasama.

- IKU 3. Jumlah pendidik SUPM Pariaman yang lulus sertifikasi profesi (Orang)

IKU ini adalah indikator yang mengukur berapa banyak guru di SUPM Pariaman yang sudah memiliki sertifikasi resmi, sebagai bukti kompetensi profesional mereka. Indikator ini penting karena langsung berkaitan dengan mutu pendidikan, kualitas lulusan, dan kinerja lembaga secara keseluruhan. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, untuk Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan pengukuran capaian.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capaian IKU ini adalah dengan mengaktifkan fungsi Pengawasan sebaik mungkin yang dilaksanakan oleh pimpinan baik di tingkat Kasubbag Umum maupun langsung oleh Kepala Sekolah dalam memonitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam upaya pencapaian target IKU ini antara lain :

1. Kegiatan pengajaran dan perkuliahan;
2. Kegiatan sertifikasi peserta didik.

Faktor penyebab keberhasilan IKU peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang) adalah sebagai berikut :

							Capaian	kenaikan TAHUN 2024 – 2025	2025	Capaian Terhadap Target 2025
-	96,55	80	85	85	86	86	100	1%	86	100

Periode pengukuran IKU ini adalah Triwulan, pada Triwulan I Tahun 2026 target Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%) sebesar 86%, realisasi 86% dengan persentasi capaian 100%. Realisasi IKU ini jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2025 terdapat kenaikan capaian karena adanya kenaikan target sesuai dengan surat dari sekretaris BRSDM bahwasanya jika tidak ada temuan serta tindak lanjutnya, maka capaiannya disamakan dengan target.

Realisasi IKU ini dibandingkan dengan realisasi Unit kerja sejenis yaitu SUPM dilingkungan BPPSDM KP sebagai berikut:

Tabel III. 5 Perbandingan Realisasi IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)

Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)				
NO	SATUAN KERJA	Target	Capaian	Persentase Capaian
1	SUPM Ladong	86	86,00	100,00
2	SUPM Pariaman	86	86,00	100,00
3	SUPM Kotaagung	86	86,00	100,00
4	SUPM Tegal	86	86,00	100,00
5	SUPM Waiheru	86	86,00	100,00

Dari data Tabel III.5 dapat dilihat bahwa hampir seluruh SUPM lingkup Pusat Pendidikan KP dapat mencapai seluruh targetnya di Triwulan I tahun 2026 kecuali beberapa SUPM yang memang tidak mempunyai IK ini. SUPM Pariaman dapat mencapai 86% dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan perbandingan capaian IK ini dengan SUPM lain dapat dilihat pada Tabel III.5 diatas

Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya IKU ini adalah peran aktif Pimpinan dalam pengawasan tindaklanjut temuan sehingga tim kerja dapat menyelesaikan dokumen sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU antara lain koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti hasil temuan inspektorat jenderal dan membuat berita acara tindaklanjut.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, untuk mendukung pencapaian IKU rekomendasi hasil pengawasan SUPM Pariaman dilakukan dengan

mengoptimalkan peran Operator Aplikasi SIDAK dalam mengumpulkan berita acara tindak lanjut dan mengunggah pada aplikasi.

➤ IKU 6. Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pariaman (Nilai)

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja.

Periode pengukuran IKU ini adalah Tahunan, Nilai PM SAKIP SUPM Pariaman merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di SUPM Pariaman. Hasil pengukuran IKU ini dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Sekretariat dari Unit Eselon I. Target yang telah ditetapkan untuk SUPM Pariaman pada tahun 2026 adalah sebesar 82.

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam Upaya pencapaian target IKU ini antara lain:

1. Dokumen SAKIP sesuai dengan literatur yang ditetapkan oleh BRSDM.
2. Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap triwulan, semesteran dan tahunan.

➤ IKU 7. Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN SUPM Pariaman yang setiap tahun diukur oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas ASN.

Periode pengukuran IKU ini adalah semesteran, Target yang telah ditetapkan untuk SUPM Pariaman pada tahun 2026 adalah sebesar 85. Pada periode ini belum dilakukan pengukuran capaian.

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam Upaya pencapaian target IKU ini antara lain:

1. Pengembangan / peningkatan Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing
2. Seminar sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.

➤ IKU 8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Pariaman (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai

dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

Periode pengukuran IKU ini adalah Tahunan, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Pariaman (Nilai) merupakan ukuran perkembangan implementasi Pengawasan Kearsipan yang ada di SUPM Pariaman. Hasil pengukuran IKU ini dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Sekretariat dari Unit Eselon I. Target yang telah ditetapkan untuk SUPM Pariaman pada tahun 2026 adalah sebesar 71.

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam Upaya pencapaian target IKU ini antara lain:

1. Dokumen Persuratan sesuai dengan literatur yang ditetapkan oleh BRSDM.
 2. Pengarsipan dokumen yang dilakukan secara berkala setelah penerbitan dokumen.
- IKU 9. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Target yang telah ditetapkan untuk SUPM Pariaman pada Triwulan I tahun 2026 dengan nilai sebesar 77. Rincian perbandingan realisasi Triwulan I Tahun 2026 dengan target tahun lalu dan target renstra pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)

SK. 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IKU.9. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)										
Realisasi TAHUN 2021 – 2025					2026				Reviu Renstra 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi 2026	% Capaian	% kenaikan 2025 - 2026	Target 2026	% Capaian Terhadap Target 2026
-	-	-	-	80	77	100	120	120	77	120

Periode pengukuran IKU ini adalah triwulan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 ini sudah dilakukan pengukuran dengan nilai realisasi 100% dengan persentase capaian menjadi 120%. Jika dibandingkan Realisasi capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya tidak ada perbedaan capaian.

Realisasi IKU ini dibandingkan dengan realisasi Unit kerja sejenis yaitu SUPM dilingkungan BPPSDM KP sebagai berikut:

Tabel III. 7 Rekapitan Satker Yang Mempunyai IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)

No	Satuan Kerja	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian
1	SUPM Ladong	77,00	100,00	120
2	SUPM Pariaman	77,00	100,00	120
3	SUPM Kotaagung	77,00	100,00	120
4	SUPM Tegal	77,00	100,00	120
5	SUPM Pontianak	77,00	100,00	120
6	SUPM Bone	-	-	-
7	SUPM Waiheru	77,00	100,00	120
8	SUPM Sorong	77,00	100,00	120
9	SUPM Kupang	77,00	100,00	120

Dari data Tabel III.7 dapat dilihat bahwa hampir seluruh SUPM lingkup Pusat Pendidikan KP dapat mencapai seluruh targetnya di Triwulan I tahun 2026 kecuali beberapa SUPM yang memang

tidak mempunyai IK ini. SUPM Pariaman dapat mencapai capaian 100% dengan persentase capaian sebesar 120%. Sedangkan perbandingan capaian IK ini dengan SUPM lain dapat dilihat pada Tabel III.7 diatas.

Faktor pendukung keberhasilan IKU ini adalah Kelengkapan Aspek ketersediaan dokumen Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP dan pagu pengadaan barang/jasa.

➤ **IKU 10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)**

Nilai IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Sumber data diperoleh dari Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA).

Target yang telah ditetapkan untuk SUPM Pariaman pada tahun 2025 adalah sebesar 92,1. Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan pengukuran capaian sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan realisasi Triwulan I Tahun 2026 dengan target tahun lalu dan target renstra.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capain IKU ini adalah dengan mengaktifkan fungsi Pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengadaan. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran.

➤ **IKU 11. Nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)**

Nilai Kinerja Anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Target yang telah ditetapkan untuk SUPM Pariaman pada tahun 2025 adalah sebesar 71,75. Periode pengukuran IKU ini adalah Tahunan, jadi pada Triwulan I Tahun 202 belum dilakukan pengukuran.

3.2.3. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya SUPM Pariaman

Organisasi Sektor Publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk Pusat Pendidikan KP. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumberdaya, efisien dalam penggunaan sumberdaya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukurandan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/ program dan tingkat satuan kerja/ kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/ program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/ kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi SMART DJA.



.....

BAB IV

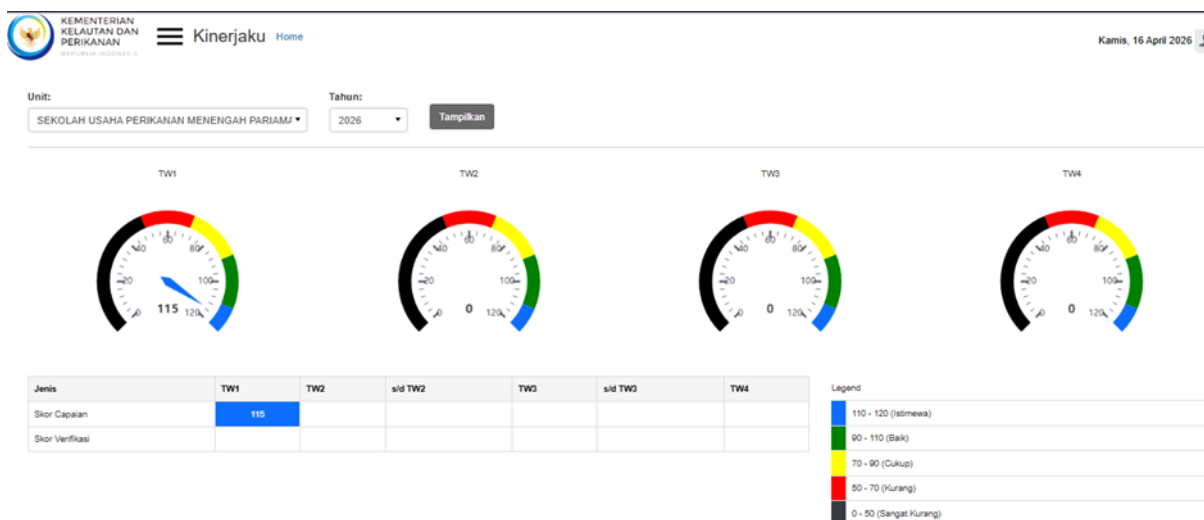
.....



BAB IV PENUTUP

4.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja SUPM Pariaman Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*) atau KPI pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2026, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar IV. 1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai 107,50% diperoleh dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. IKU Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang). IKU ini memiliki target triwulan I sebesar 7 Orang dengan capaian Triwulan I Tahun 2026 yang dicapai sebesar 10 Orang, maka persentase capaian bernilai 120%. Hal ini menunjukkan tercapainya IKU ini dengan adanya partisipasi alumni dalam melengkapi pendataan data dukung oleh satker dan banyaknya minat alumni yang ingin melanjutkan perkuliahan baik di kampus internal KKP maupun eksternal KKP.
2. IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%). Pada IKU ini memiliki target tahunan sebesar 86 dengan target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 86. Berdasarkan target tersebut capaian Triwulan I Tahun 2026 yang dicapai sebesar 86% maka persentase capaian bernilai 100%. Hal ini berarti capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan.

3. IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%). Pada IKU ini memiliki target tahunan sebesar 77 dengan target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100. Berdasarkan target tersebut capaian Triwulan I Tahun 2026 yang dicapai sebesar 100 maka persentase capaian bernilai 120%. Hal ini berarti capaian telah mencapai target yang telah ditetapkan.

4.2. Permasalahan

Berdasarkan nilai capaian IKU SUPM Pariaman pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 115%. Hal ini menunjukkan bahwa selama Triwulan I Tahun 2026 SUPM Pariaman memiliki kinerja baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk Triwulan yang akan datang diantaranya :

1. IKU Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) masih terdapat tersendatnya dalam pengumpulan data alumni dikarenakan alumni yang susah dihubungi dan kesibukan alumni setelah lulus serta kurang lancarnya penyebaran informasi pekerjaan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

4.3. Rekomendasi

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja SUPM Pariaman pada Tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Diperlukan penataan Group Ikatan Alumni di Media Komunikasi Sosial dan melakukan beberapa MoU dengan Lembaga yang bergerak di Bidang Kelautan dan Perikanan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Awal Januari 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LAGAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PARIAMAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Adnal Yeka**

Jabatan : Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Alan Frendy Koropitan**

Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Kepala Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM) Pariaman



Ditandatangani
Secara Elektronik

Adnal Yeka

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PARIAMAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)	104
		2	Jumlah kerjasama SUPM Pariaman di tahun berjalan (kesepakatan)	1
		3	Jumlah pendidik SUPM Pariaman yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	1
		4	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pariaman (%)	80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)	86
		6	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pariaman (Nilai)	82
		7	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman (Indeks)	85
		8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Pariaman (Nilai)	71
		9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)	77
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	92,1
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	71,75

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3.856.784.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	8.960.712.000
Total Anggaran SUPM Pariaman Tahun 2026		12.817.496.000

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Kepala Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM) Pariaman



Ditandatangani
Secara Elektronik

Adnal Yeka